PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT KEPATUHAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

Muhammad Novian Gilang Ramadhan*¹
Gideon Setyo Budiwitjaksono²

^{1,2} Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

*e-mail: 21013010069@student.upnjatim.ac.id¹, gideon.ak@upnjatim.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan prosedur audit kepatuhan Dana Kampanye (DaKam) partai politik dan standar mutu yang berlaku. Indonesia adalah negara demokrasi yang pemegang kedaulatan tertinggi ditangan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. Demokrasi di Indonesia mewarnai penyelenggaraan pesta demokrasi, yaitu Pemilu dan Pilkada. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Sumber data diambil dari hasil dokumen yang diterima, wawancara dan dokumentasi, pengambilan data. Penelitian menjelaskan prosedur audit kepatuhan partai politik dalam melaporkan DaKam partai politik, Hasil penelitian yang didapatkan dari perencanaan audit DaKam KAP diharuskan melakukan perikatan terlebih dahulu dalam melakukan audit DaKam, pelaksanaan audit DaKam dengan memeriksa dokumen Rekening Khusus DaKam, Laporan Awal DaKam, Laporan Pemberi Sumbangan DaKam, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran DaKam yang diunggah kedalam Sistem Informasi Kampanye dan DaKam (SIKADEKA) dan pelaporan DaKam sesuai aturan KPU dan standar audit yang berlaku.

Kata kunci : Audit Kepatuhan, Dana Kampanye, Partai Politik

Abstract

This study aims to find out the implementation of the campaign fund compliance audit procedure (DaKam) of political parties and the applicable quality standards. Indonesia is a democratic country that holds the highest sovereignty in the hands of the people as stipulated in the 1945 Constitution. Democracy in Indonesia colors the organization of the democracy party, namely the Election and Regional Elections. The research method uses qualitative. Data sources are taken from the results of documents received, interviews and documentation, data collection. The research explains the compliance audit procedure of political parties in reporting political party DaKam, The results obtained from the planning of the DaKam KAP audit are required to first engage in conducting a DaKam audit, the implementation of the DaKam audit by examining the documents of the DaKam Special Account, the DaKam Initial Report, the DaKam Donor Report, and the DaKam Revenue and Expenditure Report which are uploaded into the Campaign and DaKam Information System (SIKADEKA) and reporting DaKam according to the rules.

Keywords : Compliance Audits, Campaign Funds, Political Parties

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mengalami peningkatan yang ditandai dengan bertambahnya antusias masyarakat dalam menciptakan negara yang demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk keadilan yang partisipasi secara nyata warga negara yang ingin tergabung untuk membangun bangsa. Adanya demokrasi menciptakan tujuan yaitu menciptakan keadilan saat berpolitik serta mewujudkan keadilan untuk rakyat Indonesia pada semua kalangan (Masyitoh, Wardhani, & Set-yanigrum, 2015). Sesuai UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan MPR sepenuhnya, yang termasuk dalam pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa kedaulatan paling tinggi berada ditangan rakyat serta dijalankan berdasarkan UUD. Pada saat ini, wujud nyata dari adanya demokrasi dapat berupa keikutsertaan warga negara dalam memilih calon pemimpin yang akan menduduki kursi

pemerintahan. keikutsertaan dapat dilakuka dengan menggunakan hak pilih dengan sebaik mungkin (Sugiwa, Arifah, & Farobi, 2023).

Demokrasi di Indonesia mewarnai penyelenggaraan pesta demokrasi, termasuk saat Pemilu dan Pilkada. Pada proses tersebut, kampanye menjadi salah satu elemen penting bagi para calon untuk memperkenalkan diri dan meraih simpati masyarakat. Kampanye membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan pengaturan dan pengawasan terhadap DaKam. Dengan adanya sistem terbuka, warga negara tidak mrncoblos partai politik tetapi mencoblos calon legislatif. Calon yang terpilih pada suatu daerah didasaekan suara terbanyak yang didapat (Ganguly, Al-Faraj, & Hancock, 2021). Tentunya pada saat pemilihan secara langsung maupun tidak langsung akan memberi dampak serta peluang bagi setiap calon. (Sugiwa, dkk., 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Partai Politik

Partai politik merupakan kelompok organisasi yang memiliki anggota serta berorientasi terhadap cita-cita yang sama, nilai, dan memiliki tujuan yaitu memiliki kekuasaan politik serta memiliki kedudukan politik dengan cara konstitusional. Definisi partai politik, yakni organisasi yang dibentuk guna memengaruhi karakter serta bentuk kebijaksanaan publik dalam kepentingan ideologis dan kerangka prinsip tertentu, dengan adanya praktik kekuasaan secara langsung yang disebut partisipasi warga negara pada pemilihan (Mark N. Hugopian, 2023).

Dana Kampanye

Menurut PKPU 18 Tahun 2023 pasal 1 ayat 20, DaKam adalah jumlah dana yang berbentuk barang, jasa maupun uang yang dipergunakan calon untuk mendanai aktivitas kampanye. DaKam terdiri dari 4 hal yaitu

1. Rekening Khusus DaKam (RKDK)
2. Laporan Awal DaKam (LADK)
3. Laporan Pemberi Sumbangan DaKam (LPSDK)
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran DaKam (LPPDK)

Menurut PKPU no 18 Tahun 2023 DaKam pada Pemilu 2024 dapat diperoleh dari individu maupun berkelompok, instansi, maupun badan usaha bukan pemerintah. Tetapi, donasi DaKam yang diterima dari pihak-pihak yang ada memiliki batas penerimaan. Jika diperinci, sumbangan DaKam bagi calon presiden serta wakilnya berasal dari perorangan dengan nominal maksimal Rp2,5 miliar. Disisi lain, DaKam ditujukan kepada calon presiden beserta wakilnya yang sumbernya dair perusahaan dengan nominal maximal Rp25 miliar. Sedangkan, bagi calon anggota DPR maupun DPRD untuk sumbangan DaKam dibatasi dengan nominal Rp2,5 miliar perindividu. Dana kampanye bagi DPR yang berasal dari instansi memiliki nominal maximal yaitu Rp25 miliar. Sedangkan, sumbangan DaKam bagi calon anggota DPD maksimal sebesar Rp750 juta perindividu. Terakhir, sumbangan DaKam anggota partai politik berasal dari instansi dengan nominal maximal RP1,5 miliar.

Batasan jumlah sumbangan DaKam untuk pemilihan umum serta pemilihan presiden beserta wakilnya pada periode 2019 sampai 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode 2104. Sebagaimana diketahui, pada periode 2014, sumbangan DaKam perseorangan tidak diperkenan lebih dari Rp1 miliar serta badan usaha tidak boleh lebih ketentuan maximal yaitu Rp5 miliar. Sedangkan, pada periode 2019, sumbangan DaKam yang berasal dari perindividu tidak diperkenankan melebihi Rp2,5 miliar dan untuk kelompok tidak diperkenankan melebihi Rp 25 miliar.

Audit Kepatuhan

Berdasarkan Arens, Elder dan Beasley (2021) audit didefinisikan sebagai kesatuan atau penilaian bukti terkait kapasitas dalam menentukan serta mengumpulkan surat-menyurat yang didasarkan pada peraturan yang disepakati. Audit wajib dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi serta independen. Kompetensi merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan

tugas menunjukkan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pengetahuan, pengalaman kerja (Faizah, Budiwitjaksono & Vendy, 2024). Kompetensi menunjukkan kemampuan ilmiah dan keahlian teknis dalam bentuk ketrampilan dan pengalaman untuk mendukung pekerjaan khusus atau profesi (Budiwitjaksono dkk, 2020). Terdapat dua tipe auditor yaitu auditor internal dan auditor eksternal. Auditor eksternal merupakan pihak ketiga yang independen disebut sebagai akuntan publik. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai auditor independen,

Pekerjaan audit dilaksanakan oleh auditor berdasarkan standar yang ditetapkan untuk mencapai kualitas hasil pekerjaan audit. Kualitas audit dipengaruhi oleh Batasan lamanya pekerjaan audit (*audit tenure*) yang dapat mengurangi kemampuan auditor untuk mendeteksi potensi risiko atau ketidakpatuhan (Adriansyah & Budiwitjaksono, 2024). Audit Kepatuhan sebuah audit dengan tujuan menentukan apakah sesuatu yang diaudit sesuai dengan kondisi maupun aturan tertentu. Hasil audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk membuat kriteria. Audit kepatuhan sering dijumpai pada pemerintahan (Mulyadi, 2021). Audit kepatuhan digunakan untuk menilai kepatuhan pelaporan DaKam suatu partai. Audit kepatuhan untuk pelaporan DaKam dilakukan oleh KAP yang telah melalui proses seleksi oleh KPU. Pedoman pelaksanaan Audit Laporan DaKam diatur oleh KPU yang tertuang pada SK nomor 1781 tahun 2018.

SIKADEKA

Menurut PKPU 18 tahun 2023 SIKADEKA ialah sebuah sistem serta teknologi informasi yang dipergunakan untuk memfasilitasi tahapan kampanye maupun DaKam dan pelaksanaan penunjukkan KAP. Sistem tersebut digunakan peserta pemilu dalam penyusunan dan penyampaian laporan DaKam. Sedangkan, KPU menggunakan sistem tersebut pada perolehan laporan DaKam, maupun pelaksanaan pengadaan KAP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Anggito dan Setiawan (2020), penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena berdasarkan prospektif partisipan dan kontekstual yang mendalam. penelitian dengan metode kualitatif berupaya mengonstruksi realita dengan memahami maknanya. Dengan itu penelitian ini harus mengamati proses, peristiwa dan otentisitas. Pada dasarnya metode ini menghadirkan nilai eksplisit pada situasi tertentu dengan melibatkan subjek dengan jumlah sedikit. (Sugiyono, 2020).

Data penelitian diperoleh atas hasil dokumen yang diterima, wawancara dan dokumentasi, pengambilan data terpenting serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca adalah analisis data (Sugiyono, 2020).

PEMBAHASAN

Perencanaan Audit DaKam

Sebelum melakukan pengauditan pihak KAP melakukan perjanjian dengan pihak KPU, hal tersebut dilakukan sesuai pasal serta ketentuan yang tidak memberatkan secara sepihak. Dalam perencanaan perikatan mengatur KAP dengan prosedur yang dilakukan selama audit, tujuan audit, jangka waktu, fee audit, dan hal-hal terkait tugas auditor. Perikatan oleh kedua belah pihak, KAP mengatur tim pemeriksa yang sudah diatur dalam PKPU no 18 tahun 2023 dan sesuai dengan kriteria yang diatur dari SIKADEKA.

Perbedaan pemilu tahun 2024 dengan sebelumnya, dimana sebelumnya terjadi pandemi Covid-19 dimana tim KAP tidak bisa melakukan cek terkait laporan dana dan juga cek dokumen tambahan secara langsung disetiap kabupaten/ kota dan digantikan dengan mengisi informasi dan data diri menggunakan sistem informasi SIKAP. Namun, tidak jauh berbeda dengan pemilu sekarang dimana KAP juga mengisi informasi dan data diri dengan sistem yang telah diperbarui. Pemilu sekarang dapat juga terjun ke kabupaten/ kota untuk meminta keterangan terkait laporan dana yang digunakan dalam kampanye dan juga meminta dokumen tambahan.

Sebelum melakukan audit KPU melakukan sebuah pertemuan antara KAP dengan partai politik, dimana dalam pertemuan tersebut KPU menjelaskan tentang peraturan yang dipakai dalam audit DaKam, tata cara melakukan submit laporan dan cara mengecek dokumen yang akan diaudit, apa saja audit yang akan dilakukan KAP, tanggal awal dan akhir pelaporan DaKam dan juga menjelaskan kepada partai politik terkait laporan apa saja yang harus disiapkan. Beberapa partai politik yang ikut serta dalam pemilu 2024 telah disiapkan masing-masing akan diaudit pihak KAP yang telah menyetujui perikatan dalam audit DaKam.

Pelaksanaan Audit DaKam

Dalam pelaksanaan audit DaKam KAP melakukan melalui sistem SIKADEKA yang telah disiapkan. Sistem tersebut yang membantu dalam pengecekan dokumen yang diperlukan saat audit sesuai dengan PKPU 18 tahun 2023. Tim KAP mulai melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang disubmit oleh partai politik disistem SIKADEKA. Dokumen yang diperlukan KAP yang diatur PKPU 18 tahun 2023 terkait RKDK, LADK, LPSDK, dan LPPDK. RKDK ialah Rekening yang dikhususkan untuk DaKam yang dimana menampung dana dari partai politik atau dana sumbangan yang berupa uang tunai, pembuatan RKDK dibuat mencegah kecurangan oknum dalam menerima dana maupun mengeluarkan dana. LADK ialah laporan awal yang dibuat untuk mengetahui dana awal yang di terima partai politik tersebut. LPSDK ialah laporan sumbangan perindividu, kelompok, instansi maupun badan usaha bukan pemerintah. LPPDK ialah laporan yang dibuat untuk melaporkan dana yang diterima partai politik dan dana yang dikeluarkan oleh partai politik supaya tidak melanggar aturan terkait maksimal dana yang dikeluarkan kampanye diatur dalam PKPU 18 tahun 2023.

KAP membuat kertas kerja audit DaKam yang diatur PKPU 18 tahun 2023, dalam pengerjaan kertas kerja diharuskan mengecek sistem yang telah disediakan karena setiap kabupaten / kota berbeda-beda terkait dana yang diterima dari partai politik maupun dari sumbangan dan juga pengeluaran yang berbeda-beda. Pengerjaan kertas kerja paling lambat 30 hari dari tanggal awal melakukan audit, seminggu sebelum tanggal berakhir diharuskan melakukan submit laporan audit ke sistem SIKADEKA dan mencetak hardfile laporan audit yang diberikan ke KPU. Dalam isi kertas kerja KAP hanya mengecek apakah dokumen yang dilampirkan partai politik sesuai dengan kertas kerja yang dibuat KAP sesuai PKPU 18 tahun 2023.

Dalam pelaksanaan DaKam, tim audit mengumpulkan bukti, evaluasi kecukupan bukti, pemeriksaan LPPDK, melakukan konfirmasi, dan menyimpulkan asersi kepatuhan peserta pemilu. Dikarenakan telah disiapkan SIKADEKA maka peserta pemilu diharuskan mengunggah LPPDK tersebut. Tim audit mengumpulkan bukti dari unggahan peserta pemilu dan melakukan pengecekan sesuai aturan PKPU 18 tahun 2023. Pengecekan itu berupa RKDK, LADK, LPSDK, dan LPPDK. Selanjutnya tim audit melakukan evaluasi bukti. Evaluasi dilakukan dengan tujuan memastikan bahwasannya bukti dari unggahan peserta pemilu kedalam SIKADEKA sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, jika bukti yang diberikan kurang relevan tim audit melakukan komunikasi kepada peserta pemilu untuk meminta bukti konkret.

Setelah itu, tim audit melakukan pemeriksaan LPPDK dan kepatuhan dari peserta pemilu. Pemeriksaan diawali dengan memverifikasi terkait bukti yang dikumpulkan. Verifikasi bertujuan untuk memastikan saldo awal sesuai dengan penerimaan dana, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Tim audit memastikan bahwa dana dan data transaksi yang tercatat sudah sesuai dengan bukti yang diberikan. Setelah itu, tim audit melakukan rekonsiliasi terhadap LADK dan RKDK, rekonsiliasi dilakukan pada saat penutupan pembukuan LADK.

Prosedur dalam melaksanakan audit DaKam yaitu konfirmasi. Tim audit melakukan konfirmasi kepada KPU terkait kesesuaian penyampaian batas waktu pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK peserta pemilu. Tim audit melakukan konfirmasi kepada pihak bank terkait kesesuaian saldo pembukaan RKDK. Konfirmasi dilakukan juga kepada pihak sumbangan dalam memastikan saldo yang diterima pada LPSDK sesuai dengan bukti pendukung yang diunggah.

Pelaporan Audit DaKam

Pelaporan audit DaKam adalah *output* pekerjaan setelah dikerjakan oleh *team* audit dengan melakukan perbandingan antara kegiatan dengan prosedur yang sesuai bukti pendukung. Apabila kegiatan telah sama dengan bukti pendukungnya sehingga *output* laporan adalah patuh. Namun, aktivitas yang bertolakbelakang dengan bukti tambahan, audit *report* berisi opini tidak patuh yang diserahkan tim KAP untuk diunggah kedalam SIKADEKA.

Dalam melakukan pengunggahan laporan audit pada SIKADEKA terjadi kendala, seperti kendala pada jaringan dan *server down*. Dalam melakukan pengaksesan laporan DaKam dilakukan secara serentak dan menjadikan jaringan yang dipakai dalam melakukan pengunduhan menjadi terhambat dan *server* SIKADEKA menjadi *down* karena banyaknya pengguna yang mengakses sistem tersebut, mengakibatkan tim audit menunggu dan juga bisa menghambat pelaksanaan audit.

Kendala lain juga kurangnya pemahaman dari peserta pemilu, beberapa dokumen yang tidak sesuai, tidak lengkap, tidak konkret. Mengharuskan tim audit melakukan konfirmasi pada peserta pemilu tersebut terkait kelengkapan dokumen yang tidak sesuai. Tim audit meminta peserta pemilu untuk menyiapkan dokumen konkret dan juga mengirimkan dokumen sebagai bukti bahwa peserta pemilu melakukan kesalahan dalam pengunggahan. Kendala lain juga sempat terjadi dikarenakan beberapa peserta pemilu yang gagal ada beberapa yang tidak bertanggung jawab untuk melaporkan DaKam. Namun, ada juga peserta pemilu yang kalah melakukan pelaporan DaKam tetap melaporkan DaKam, peserta pemilu tersebut masih memiliki kesadaran yang lebih baik daripada tidak melaporkan DaKam.

Tim auditor melakukan kesimpulan atas hasil dari pengamatan serta penghimpunan bukti-bukti yang memadai yang ada pada laporan asurans. Kesimpulan didasari pada hasil evaluasi auditor dengan mempertimbangkan peraturan serta aspek yang ada. Laporan asurans ditunjukkan secara tertulis serta berisi pernyataan akan kesimpulan hasil evaluasi dari adanya Laporan DaKam. Tahap selanjutnya yaitu, menyusun Laporan Final Audit dan diserahkan ke KPU. Batas penyerahan laporan audit atas DaKam disepakati setelah 30 hari sejak Laporan DaKam diterima. KAP wajib menyampaikan Hasil Audit kepada KPU sesuai dengan tanggal yang disepakati. Dengan demikian, berjalannya prosedur audit DaKam sesuai standar mutu audit yang berlaku.

KESIMPULAN

Penelitian diatas membahas tentang *compliance audited* DaKam partai politik. KAP tidak melakukan kunjungan di tiap kabupaten/kota, dikarenakan dokumen peserta pemilu diunggah pada sistem yang disediakan oleh KPU, yaitu SIKADEKA. Sistem tersebut menampung dokumen laporan DaKam dan juga bukti pendukung. KAP dalam melaksanakan audit DaKam dengan mengumpulkan dan memeriksa dokumen dari sistem yang disediakan. Hasil dari pekerjaan audit dengan melakukan perbandingan antara kegiatan serta prosedur didasarkan pada bukti pendukung. Jika kegiatan telah sesuai dengan bukti pendukungnya, hasil dari laporan yaitu patuh. Namun, aktivitas yang tidak searah dengan bukti pendukungnya dianggap tidak patuh. Laporan audit asurans merupakan penjelasan terkait kepatuhan yang diserahkan tim KAP dan diunggah dalam SIKADEKA.

Tim auditor melakukan kesimpulan terkait hasil dari pemeriksaan serta pengumpulan bukti yang ada pada laporan asurans. Kesimpulan didasari atas hasil evaluasi auditor dengan pertimbangan peraturan serta aspek yang berlaku. Setelah itu, dilakukan penyusunan Laporan Final Audit serta diserahkan pada pihak KPU. Berkaitan dengan batasan penyerahan laporan audit DaKam telah disepakati yaitu 30 hari setelah Laporan DaKam diterima. KAP menyerahkan Laporan Hasil Audit kepada pihak KPU sesuai aturan yang disepakati. Secara keseluruhan, pelaksanaan prosedur audit DaKam yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar mutu audit yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Adriansyah, R. dan Budiwitjaksono, G. S., (2024). Analisis Pengaruh Opini Going Concern Dan Audit

- Tenure Terhadap Hasil Kualitas Audit. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*. Vol 7 (4), 8072-8078. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/10345/6322>
- Andini, B. N., Monteiro, F., & Soebandi. (2019). Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan DaKam Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan DaKam (Studi Kasus di KPU Kabupaten Sidoarjo). *Media Mahardhika*, 17(1), 25–45. <https://jurnal.stiemahardhika.ac.id/index.php/mahardhika/article/view/56>
- Budiwitjaksono, G.S., Yuhertiana, Indrawati & Romaisyah, Luqita. (2020). *The Synergy Of Ethical Aspects And State Defence Characters To Accounting Competency*. *International Journal of Social Science and Economic Research*. Vol. 5 (3), 719-729. <https://doi.org/10.46609/IJSSER.2020.v05i03.010>
- Darmoko, H. W., Hermawan, H., & Rochman, F. (2022). *H+ +121-127*. 3(September), 121–127.
- Faizah, Nur., Budiwitjaksono, G.S., Vendy, Vicky. (2024). Kualitas Sumber Daya Manusia Memoderasi Determinan Senjangan Anggaran. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*. Vol 8 (1), 26-35. <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/1065/571>
- Ilham, & Bashori Hasba, I. (2023). Sumbangan DaKam Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia). *UNES Law Review*, 6(1), 3832–3843. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Komisi Pemilihan Umum, & Republik Indonesia. (2023). Peraturan KPU No.8 Tahun 2023. *Jdih.Kpu.Gp.Id*, 1–397.
- Mantasari, R., & Praptoyo, S. (2019). Pengaruh SPA 3000 Terhadap Kepatuhan Pelaporan DaKam Calon Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–17.
- Mutiara, N., Husna, A., & Budiarmanto, A. (2021). Pelaksanaan Prosedur Audit DaKam di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 9(Desember), 113–131.
- Nusantara, G. C. (2019). Sistem Pelaporan DaKam Berbasis Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). UU no.7 2017 Pemilu Serentak. *Undang-Undang Pemilu*. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Rahmatika, D. N. (2021). Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan DaKam Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 13(1), 97–107. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>